

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Pulau Sumatera terletak di bagian barat gugusan kepulauan Indonesia. Di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, di timur dengan Selat Malaka, di sebelah selatan dengan Selat Sunda, dan di sebelah barat dengan Samudera Hindia. Luas pulau ini sekitar 473.481 km² dan memiliki penduduk sekitar 57.940.351 jiwa menurut sensus penduduk tahun 2018.



Sumber: Wikipedia.org (diakses tanggal 20 januari, 2019).

Gambar 4.1
Peta Wilayah Pulau Sumatera

Sumatera merupakan pulau terbesar keenam di dunia dan ketiga terbesar di Indonesia setelah pulau Kalimantan dan Papua. Pulau Sumatera merupakan pulau yang kaya dengan hasil bumi. Dari lima provinsi kaya di Indonesia, tiga

provinsi terdapat di pulau Sumatera, yaitu Provinsi Aceh, Riau dan Sumatera Selatan. Hasil-hasil utama pulau Sumatera ialah kelapa sawit, tembakau, minyak bumi, timah, bauksit, batu bara dan gas alam. Pemerintahan di Sumatera dibagi menjadi 10 provinsi, yaitu:

1. Aceh

Aceh memiliki luas sekitar 57.117 km². Ibu kota Aceh adalah Banda Aceh. Aceh memiliki 23 kabupaten. Aceh resmi menjadi provinsi di Indonesia pada tanggal 7 Desember 1959.

2. Sumatera Utara

Sumatera Utara memiliki luas sekitar 72.271 km². Ibu kota Sumatera Utara adalah Medan. Sumatera Utara memiliki 33 kabupaten. Sumatera Utara resmi menjadi provinsi di Indonesia pada tanggal 29 November 1956.

3. Sumatera Barat

Sumatera Barat memiliki luas sekitar 42.095 km². Ibu kota Sumatera Barat adalah Padang. Sumatera Barat memiliki 19 kabupaten. Sumatera Barat resmi menjadi provinsi di Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1957.

4. Riau

Riau memiliki luas sekitar 88.899 km². Ibu kota Riau adalah Pekanbaru. Riau memiliki 12 kabupaten. Riau resmi menjadi provinsi di Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1957.

5. Kepulauan Riau

Kepulauan Riau memiliki luas sekitar 8.290 km². Ibu kota Kepulauan Riau adalah Tanjung Pinang. Kepulauan Riau memiliki 7 kabupaten. Kepulauan Riau resmi menjadi provinsi di Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2012.

6. Jambi

Jambi memiliki luas sekitar 49.203 km². Ibu kota Jambi adalah Jambi memiliki 11 kabupaten. Jambi resmi menjadi provinsi di Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1957.

7. Bengkulu

Bengkulu memiliki luas sekitar 19.929 km². Ibu kota Bengkulu adalah kota Bengkulu. Bengkulu memiliki 10 kabupaten. Bengkulu resmi menjadi provinsi di Indonesia pada tanggal 18 November 1968.

8. Sumatera Selatan

Sumatera Selatan memiliki luas sekitar 87.102 km². Ibu kota Sumatera Selatan adalah Palembang. Sumatera Selatan memiliki 17 kabupaten. Sumatera Selatan resmi menjadi provinsi di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1950.

9. Kepulauan Bangka Belitung

Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas sekitar 16.790 km². Ibu kota Kepulauan Bangka Belitung adalah Pangkal Pinang. Kepulauan Bangka Belitung memiliki 7 kabupaten. Kepulauan Bangka Belitung resmi menjadi provinsi di Indonesia pada tanggal 21 November 2000.

10. Lampung

Lampung memiliki luas sekitar 33.843 km². Ibu kota Lampung adalah Bandar Lampung. Lampung memiliki 15 kabupaten. Lampung resmi menjadi provinsi di Indonesia pada tanggal 18 Maret 1964.

Tabel 4.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Pada 5 Provinsi Dengan IPM Tertinggi Di
Pulau Sumatera Tahun 2010-2017

Tahun	Aceh	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Riau	Kepulauan Riau
2010	4523144	12985075	4865331	5538367	1692816
2011	4611033	13103596	4933112	5726241	1748810
2012	4715108	13215401	5000184	5879109	1805089
2013	4811133	13326307	5066476	6033268	1861373
2014	4906835	13326307	5131882	6188442	1917415
2015	5001953	13937797	5200947	6344402	1973043
2016	5096248	14102911	5272525	6500971	2028169
2017	5184003	14262147	5342836	6657911	2082694

Sumber: Data Kependudukan BPS 2017.

B. Perkembangan Variabel Penelitian

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia yang diukur berdasarkan aspek kesehatan, pendidikan dan kemampuan secara ekonomi. Pencapaian pembangunan manusia secara umum dapat diketahui melalui perkembangan kondisi indeks pembangunan manusia yang menggambarkan pencapaian pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang membaik. Secara keseluruhan, perkembangan kualitas pembangunan manusia yang tertinggi di pulau Sumatera dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau dan diikuti oleh Provinsi Riau, Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Berikut adalah tabel perkembangan indeks pembangunan manusia yang terdapat pada 5 provinsi di pulau Sumatera.

Tabel 4.2
Kondisi IPM Pada 5 Provinsi Dengan IPM Tertinggi Di Pulau Sumatera

Provinsi	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aceh	67.09	67.45	67.81	68.3	68.81	69.45	70	70.6
Sumatera Utara	67.09	67.34	67.74	68.36	68.87	69.51	70	70.57
Sumatera Barat	67.25	67.81	68.36	68.91	69.36	69.98	70.73	71.24
Riau	68.65	68.9	69.15	69.91	70.33	70.84	71.2	71.79
Kepulauan Riau	71.13	71.61	72.36	73.02	73.4	73.75	73.99	74.45

Sumber: Data BPS berbagai terbitan.

Dapat dilihat dari Tabel 4.2 yang menunjukkan perkembangan angka indeks pembangunan manusia di 5 provinsi di pulau Sumatera. Dari angka IPM pada 5 provinsi diatas dapat disimpulkan bahwa kelima provinsi tersebut berada pada kategori dengan tingkat pembangunan manusia menengah, dari tahun 2010 sampai 2017 angka IPM dari kelima provinsi mengalami peningkatan tiap tahunnya, IPM tertinggi dari kelima provinsi tersebut terjadi pada Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami peningkatan dari tahun 2010 dengan IPM dengan angka 71.13 mengalami peningkatan cukup positif menjadi 74.45 pada tahun 2017. Dan diikuti oleh Provinsi Riau, Sumatera Barat, Aceh dan diposisi kelima Provinsi Sumatera Utara.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah setiap tahun yang didapatkan dari potensi-potensi di setiap daerah, diantaranya pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta penerimaan lain-lain yang sah yang telah terdapat dalam peraturan daerah. Pendapatan yang berasal dari daerah merupakan faktor penting demi terwujudnya pembangunan di suatu daerah karena digunakan

untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Berikut perkembangan pendapatan daerah yang berasal dari PAD di 5 provinsi di pulau Sumatera tahun 2010-2017.

Tabel 4.3
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pada 5 Provinsi Dengan IPM Tertinggi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2017 (Juta Rupiah)

Tahun	Provinsi				
	Aceh	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Riau	Kepulauan Riau
2010	355478	1162868	552991	1002811	521053
2011	487264	1954613	706463	1154638	620901
2012	901174	2256818	807188	1344644	723058
2013	1046451	2642299	1073074	1649122	907982
2014	1910113	3400797	1336575	1932229	1070208
2015	1972049	4883880	1876733	3476960	1127745
2016	2057481	4630468	1894690	3495548	1173892
2017	2227055	4925627	2044504	3735800	1241223

Sumber: BPS berbagai terbitan.

Pada Tabel 4.3 menunjukkan perkembangan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah memperlihatkan pertumbuhan yang cukup signifikan tiap tahunnya di tiap daerah. Maka dari itu pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan dana yang bersumber dari penerimaan daerah untuk pembangunan daerah semaksimal mungkin.

3. Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di berbagai daerah, jumlah penduduk miskin disuatu daerah juga berbeda-beda. Jumlah penduduk miskin yang dimaksud ini adalah merupakan penduduk yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Dan kemiskinan juga

menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan maupun kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Oleh sebab itu pemerintah baik pusat maupun daerah masih berupaya untuk mengatasi dan mengurangi masalah kemiskinan agar pembangunan dapat dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan tidak hanya dalam pembangunan ekonomi tetapi juga pembangunan manusia. Menurut BPS kemiskinan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pokok. Berikut ini data kondisi jumlah penduduk miskin pada 5 provinsi di pulau Sumatera.

Tabel 4.4
Kondisi Jumlah Penduduk Miskin Pada 5 Provinsi Dengan IPM Tertinggi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2017 (Ribuan Jiwa)

Tahun	Provinsi				
	Aceh	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Riau	Kepulauan Riau
2010	861.85	1477.1	458.2	558	138.19
2011	894.8	1421.4	441.8	472.45	129.56
2012	909.04	1400.4	401.5	476.46	131.2
2013	842.42	1416.4	384.1	511.47	119.31
2014	881.27	1360.6	354.74	498.28	127.8
2015	851.59	1508.1	379.6	531.39	122.4
2016	848.44	1455.9	371.55	515.4	120.41
2017	872.61	1326.57	364.51	514.62	125.37

Sumber: Data Kemiskinan BPS 2017.

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan angka jumlah penduduk miskin dari 5 provinsi dalam kurun waktu 2010-2017 yang mengalami fluktuatif. Jika dilihat perdaerah di beberapa provinsi mengalami penurunan jumlah penduduk miskin tetapi di Provinsi Aceh angka kemiskinan cenderung mengalami

peningkatan pada tahun 2010 jumlah kemiskinan sebanyak 861.85 ribu jiwa sedangkan tahun 2017 menjadi 872.61 ribu jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada provinsi lain cenderung berfluktuatif tiap tahunnya dari tahun 2010-2017.

4. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. pendidikan juga berperan penting dalam peningkatan kualitas hidup manusia baik individu dan masyarakat. semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka akan semakin baik kualitas sumber daya masyarakat. Elemen utama dalam meningkatkan pembangunan manusia di suatu daerah adalah pendidikan, sehingga peningkatan IPM di bidang pendidikan sangat diperlukan.

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang menggambarkan kualitas dari sumber daya manusia, semakin tingginya tingkat pendidikan akan mempercepat pembangunan suatu bangsa. Fasilitas dan tenaga pengajar juga menjadi faktor pendukung terciptanya kualitas pendidikan yang baik. Maka dari itu pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan melalui anggaran yang dialokasikan untuk bidang pendidikan dengan tujuan dapat memperbaiki kualitas hidup manusia untuk terciptanya kesejahteraan. Berikut adalah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk bidang pendidikan yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Pada 5 Provinsi
Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2017 (Juta Rupiah)

Tahun	Provinsi				
	Aceh	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Riau	Kepulauan Riau
2010	1991115	6690893	3366240	1726840	1551224
2011	2036180	7011171	3650530	1772988	1577435
2012	2108503	7357221	4020437	1849884	1772834
2013	2201840	7970451	4357636	1926736	1827200
2014	2314478	8478260	4657618	2040429	1905304
2015	2487430	8904741	5022030	2170087	2022476
2016	2736014	9341369	5416448	2184918	2201374
2017	3009109	9802148	5954627	2266743	2428194

Sumber: BPS berbagai terbitan.

Dari Tabel 4.5 menunjukkan data anggaran pemerintah bidang pendidikan menunjukkan dalam kurun waktu 2010-2017 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun secara bertahap di setiap provinsi. Hal ini menunjukkan besarnya upaya pemerintah dalam melakukan peningkatan kualitas tingkat pendidikan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berpendidikan demi menunjang peningkatan pembangunan manusia.

5. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan merupakan salah satu anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperbaiki fasilitas kesehatan ataupun untuk upaya meningkatkan kesehatan bagi masyarakat. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan secara tidak langsung diharapkan jumlah masyarakat yang sehat akan semakin banyak.

Tingkat kesehatan merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan pembangunan manusia, anggaran kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan

usia harapan hidup, kualitas sumber daya manusia, dan yang terpenting untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat. Anggaran pemerintah untuk bidang kesehatan juga bagian dari upaya pemerintah yang dikeluarkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana maupun tenaga kesehatan serta tingkat kualitas kesehatan bagi masyarakat. Berikut pengeluaran pemerintah pada 5 provinsi di pulau Sumatera tahun 2010-2017 yang dialokasikan pada bidang kesehatan.

Tabel 4.6
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Pada 5 Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2017 (Juta Rupiah)

Tahun	Provinsi				
	Aceh	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Riau	Kepulauan Riau
2010	2160422	2500421	1258505	535046	1064838
2011	2256744	2900539	1360529	581018	1138742
2012	2514908	3207547	1504009	634373	1230373
2013	2683144	3554516	1620725	688352	1250994
2014	2828131	3793268	1749926	746169	1311567
2015	3003009	4066722	1881299	820337	1405320
2016	3219468	4366281	1984293	824914	1467870
2017	3516047	4699320	2154588	872905	1618900

Sumber: BPS berbagai terbitan.

Dari Tabel 4.6 yang memperlihatkan perkembangan pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan sama seperti anggaran pendidikan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2010-2017 yang menunjukkan tren positif pada tiap provinsi yang ada di pulau Sumatera. Secara tidak langsung peningkatan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan ini diharapkan akan berdampak pada membaiknya kualitas tingkat kesehatan di setiap provinsi.